

**Nasya Febriana¹⁾
Diana Hertati²⁾**

**^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur
nasyaf29@gmail.com**



LPPM STIA Said Perintah

Volume 4, No. 2, September 2023

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 08 - 16

Accepted; 2023 - 09 - 04

Published; 2023 - 09 - 06

Abstract

Stunting in Indonesia is still relatively high, including Probolinggo Regency which ranks 4th in East Java Province based on <https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/> data has a stunting prevalence of 23.5% based on SSGI data in 2021. Stunting in Probolinggo Regency is said to be high because it exceeds the minimum stunting percentage, which is 14%. So to overcome stunting, legal certainty was made, namely Probolinggo Regent Regulation Number 15 of 2019 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention in Probolinggo Regency, one of the strategies is by establishing cooperation and harmonization across sectors. Therefore, the dynamics of collaborative governance are needed, so that the cooperation established by these stakeholders can support the reduction of stunting that occurs in Probolinggo Regency. The purpose of this study is to determine and describe collaborative governance in stunting reduction in Probolinggo Regency using Ansell and Gash, (2008) theory references which have four variables, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration process. This study used qualitative method with a descriptive approach. The conclusion that can be drawn from this study is that collaborative governance carried out as a whole has run optimally and obtained good intermediate results.

Keywords : *Stunting, Collaborative Governance, Stakeholders,*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk berjumlah besar, hal tersebut bisa dijadikan untuk modal utama dalam melakukan pembangunan nasional. Indonesia diprediksi akan memasuki era bonus demografi, pada era ini harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Bonus demografi merupakan struktur umur penduduk pada suatu negara didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (15-64). Kualitas sumber daya manusia yang baik adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, oleh sebab itu dibutuhkan persiapan yang maksimal agar Indonesia memiliki sumber daya berkualitas dan berkompeten. Selain itu juga keberhasilan pembangunan nasional juga dilihat dari kesehatan yang prima, sebab kekurangan gizi dapat menghambat pembangunan. Sumber daya yang prima jika tidak didampingi dengan pemenuhan gizi akan menimbulkan *stunting*. Kurangnya asupan gizi yang diberikan pada anak dalam rentang waktu yang cukup lama akan menghambat perkembangan dan kinerja otak anak sehingga akan menyebabkan *stunting* (Marwiyah, Devi, & Jailani, 2022). Adapun dampak yang ditimbulkan *stunting*, menurut Sumardilah, D. S., & Rahmadi, A., (2019) bahwa dampak yang terjadi terbagi menjadi dua, yaitu; dampak jangka pendek meliputi terganggunya perkembangan otak, terganggunya kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme tubuh dan dampak jangka panjang meliputi menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga akan mudah sakit, resiko tinggi penyakit kronis, disabilitas pada usia tua dan kualitas kerja yang tidak kompetitif dimasa depan.

Stunting di Indonesia masih tergolong tinggi (menurut *World Health Organization* (WHO) tingginya *stunting* pada suatu negara jika prevalensinya lebih dari 20%), sedangkan Indonesia memiliki prevalensi *stunting* sebesar 24,4% berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Untuk menanggulangi *stunting* di Indonesia tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting* bahwa dalam rangka menurunkan *stunting* ditetapkan strategi nasional yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas kehidupan, menjamin pemenuhan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Stunting tersebar diseluruh provinsi Indonesia termasuk juga provinsi Jawa Timur. Jawa Timur sendiri memiliki prevalensi *stunting* berdasarkan SSGI Tahun 2021 sebesar 23,5%.

Data Balita *Stunting* Provinsi Jawa Timur

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------------|
| 2019 | 99.827 jiwa |
| 2020 | 144.909 jiwa |
| 2021 | 216.380 jiwa |

Sumber; Diolah dari <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev>, (2023)

Salah satu daerah yang memiliki masalah tersebut di Provinsi Jawa timur adalah Kabupaten Probolinggo. *Stunting* di Kabupaten Probolinggo menempati peringkat ke 4 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 dengan prevalensi berdasarkan data SSGI tahun 2021 sebesar 23,3% seperti pada data berikut ini.

Stunting Provinsi Jawa Timur 2021



Sumber; <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev>, (2023)

Stunting yang terjadi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan di setiap tahunnya, namun masih diatas angka minimal persentase *stunting*.

Data Balita *Stunting* Kabupaten Probolinggo 2019-2021

| Tahun | Jumlah |
|-------|-------------|
| 2019 | 12.980 jiwa |
| 2020 | 12.933 jiwa |
| 2021 | 12.769 jiwa |

Sumber: Diolah dari <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/>, (2023)

Dapat diketahui dari data diatas bahwa *stunting* di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan di setiap tahunnya. Kabupaten Probolinggo memiliki 24 Kecamatan, hampir di seluruh kecamatan terdapat balita *stunting* dan masih ada beberapa kecamatan yang mengalami kenaikan yang signifikan disetiap tahunnya. Padahal pada tahun 2019 Kabupaten Probolinggo meraih penghargaan dibidang ketahanan pangan dan meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Walaupun sederet penghargaan yang telah diraih, Kabupaten Probolinggo masih belum bisa terbebas dari *stunting*.

Maka untuk menanggulangi *stunting* di Kabupaten Probolinggo dibuatlah kepastian hukum, yaitu Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Probolinggo, salah satu strateginya ialah dengan cara menjalin komunikasi, kerjasama serta harmonisasi lintas sektor sebagai upaya penguatan kelembagaan *stunting*. Oleh sebab itu permasalahan *stunting* ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun diperlukan kolaborasi multisektoral untuk menekan angka pertumbuhannya.

Multisektoral mengacu pada kerjasama yang dijalin secara sengaja dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, diantaranya adalah pemerintah, swasta, organisasi publik dan masyarakat sipil berkolaborasi memanfaatkan pengetahuan, keahlian serta sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama (Salunke & Lal, 2017). Dalam hal ini, organisasi Aisyiyah menjadi organisasi yang turut terlibat dalam mendukung penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo. Organisasi Aisyiyah merupakan organisasi gerakan wanita Muhammadiyah yang selalu tampil untuk memperjuangkan hak dan juga peran wanita dalam dunia politik maupun domestik, mementang adanya diskriminasi gender dan kekerasan pada wanita serta perlindungan anak. Pemerintah bersama dengan organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo berkolaborasi dalam penanggulangan *stunting* serta didukung dengan keberadaan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu dibutuhkannya dinamika *collaborative governance*, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan ini dapat menunjang dalam penanggulangan *stunting* yang ada di Kabupaten Probolinggo secara optimal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, mendorong peneliti untuk untuk melakukan kajian secara mendalam dengan topik penanggulangan *stunting* di Kabupaten

Probolingo dalam prespektif *collaborative governance*. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo dalam prespektif *collaborative governance*. Harapannya temuan hasil kajian ini berkontribusi positif dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo.

Kerangka Teoritis

Stunting

Menurut Tentama et al., (2018) *stunting* adalah keadaan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badan anak lain yang seumurannya, hal ini diakibatkan dari kurangnya asupan gizi yang didapatkan oleh bayi selama masa 100 hari perama kehidupannya. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki ibu pada masa kehamilan mengenai kesehatan dan asupan gizi yang baik merupakan penyebab terjadinya *stunting*. Menurut Annita Olo et al., (2021) permasalahan *stunting* yang terjadi bisa mengakibatkan sakit, gangguan fisik, gangguan perkembangan mental, kognitif serta gangguan motorik pada anak hingga kematian.

Muhammad Ridho et al., (2021) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya *stunting* pada anak usia dini di Indonesia, yaitu;

1. Tingkat asupan energi
2. Berat badan lahir
3. Tingkat pendidikan ibu
4. Tingkat pendapatan keluarga
5. Pola asuh
6. Keragaman pangan

Governance

Menurut Dwiyanto dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) *governance* memiliki perhatian lebih terhadap urgensi keterlibatan dari pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang harus di hadapi. Menurut Rhodes dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) menjelaskan bahwa *governance* merujuk kepada perubahan yang terjadi dari tata kelola pemerintahan yang memiliki makna lebih luas yakni sebuah proses baru pengaturan (*new process of*

governing), perubahan kondisi pengaturan (*a changed condition ordered rule*), maupun sebuah metode baru dimana masyarakat dapat diatur (*new methode by which society is governed*).

Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) juga menyatakan bahwa *governance* merupakan bentuk perpindahan pada penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya mengacu pada pemerintahan saja, namun melibatkan aktor-aktor lain dalam berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta dan lainnya. Sebagai mana halnya yang dikatakan oleh Triariyanti Setyowati, (2019) bahwa *governance* ini lebih menekankan pada pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta, serta masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan pemerintahan, tapi memerlukan kontribusi dari sektor lain diluar pemerintahan.

Collaborative Governance

Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) mengatakan bahwa *collaborative governance* memiliki fokus yakni pada kebijakan dan masalah publik. Dalam *collaborative governance* menghendaki tercapainya keadilan sosial dalam pemenuhan kepentingan-kepentingan publik. *Collaborative governance* merupakan model kesepadanan antara beberapa elemen yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu kekuatan sumber daya antar pemerintahan, pemangku kepentingan serta lembaga publik lainnya dengan komitmen guna memberdayakan pemangku kepentingan yang lebih lemah untuk saling berhubungan dalam mengatasi tantangan yang muncul melalui pengambilan keputusan bersama dan berorientasi pada konsesus (Islamy, 2018).

Sejalan dengan pendapat diatas, Hertati & Arif, (2022) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholder*, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini terjadi karena dibentuk secara sengaja atas inisiatif berbagai pihak yang mendukung adanya kerjasama dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dengan lembaga masyarakat sipil dapat mencakup kedua jenis lembaga dalam masyarakat baik lembaga yang independen maupun lembaga yang menjadi binaan pemerintah (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020). Kegiatan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dengan lembaga masyarakat sipil independen didorong oleh keyakinan yang dalam untuk dapat

mewujudkan pelayanan publik dan kegiatan pemerintah partisipatif. Salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberdayakan warga negara atau pertimbangan etis yakni keyakinan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik harus menempatkan warga negara dan pengguna layanan sebagai subjek yang keterlibatannya sangat diperlukan dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020).

Implementasi *collaborative governance* sendiri membutuhkan keterlibatan beberapa pemangku kepentingan. Menurut Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) bahwa pemangku kepentingan merupakan individu, kelompok, ataupun lembaga yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap permasalahan atau kegiatan yang akan diselesaikan. Terdapat beberapa pemangku kepentingan seperti *Triple Helix*, *Quadra Helix* dan *Penta Helix*, seperti pada tabel berikut ini.

Pemangku Kepentingan *Triple Helix*, *Quadra Helix* dan *Penta Helix*

| <i>Triple Helix</i> | <i>Quadra Helix</i> | <i>Penta Helix</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah | Pemerintah | Pemerintah (<i>government</i>) |
| Bisnis | Bisnis | Dunia usaha (<i>business</i>) |
| Akademisi | Akademisi | Akademisi (<i>academician</i>) |
| | Organisasi non pemerintah/ <i>civil society</i> | Organisasi non pemerintah (<i>non government organization/ civil society</i>) |
| | | Media massa (<i>mass media</i>) |

Sumber; Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020)

Ansell & Gash, (2008) berpendapat bahwa *collaborative governance* merupakan pelaksanaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintahan, serta berorientasi konsensus dan musyawarah pada pengambilan keputusan dan merancang serta menerapkan kebijakan publik. Model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, (2008) ini memiliki 4 tahapan utama, yaitu;

1. Kondisi awal,
2. Desain kelembagaan,
3. Kepemimpinan fasilitatif, dan
4. Proses kolaborasi yang memiliki lima sub tahapan pendukung, yaitu;
 - a. Dialog tatap muka,
 - b. Membangun kepercayaan,

- c. Komitmen dalam proses kolaborasi,
- d. Pemahaman bersama
- e. Hasil antara.

Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash, (2008)



Sumber; Ansell & Gash, (2008)

Berdasarkan beberapa pengertian yang ada diatas, dapat diketahui bahwa *collaborative governance* ini timbul karena ketidakmampuan suatu pihak dalam menyelesaikan masalah, sehingga menciptakan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan.

Tantangan *Collaborative Governance*

Waardenburg dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) menjelaskan bahwa biasanya dalam *collaborative governance* akan menghadapi tiga jenis tantangan yang sangat kompleks, yaitu;

1. Tantangan Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang sangat spesifik bisa dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan mulai dari akar permasalahannya, namun permasalahan akan sulit dipecahkan sebab adanya prespektif yang berbeda-beda dari pemangku kepentingan.

2. Tantangan pada Proses Kolaborasi

Permasalah awal yang selalu ada pada kegiatan *collaborative goevrnance* ialah untuk bisa mencapai pemahaman bersama tetang tujuan dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan pelaksanaan *collaborative governance*. Hambatan lain yang dapat terjadi ialah persaingan yang timbul antar pemangku kepentingan, enggan berpartisipasi secara penuh karena kesibukan atau tidak yakin dengan hasilnya atau

khawatir pendapatan akan diabaikan oleh pemangku kepentingan yang lainnya. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi ini diperlukan adanya kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang baik serta meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa dalam kolaborasi ini sama-sama saling menguntungkan seluruh pihak dan bersikap profesional.

3. Tantangan Akuntabilitas dengan Multi-relasi

Tantangan yang terakhir dalam *collaborative governance* ialah hubungan antar kolaborasi dengan pihak luar maupun pihak dalam kolaborasi itu sendiri, berkenaan bagaimana semua pihak dapat melakukan tindakan secara kolektif. Selain itu biasanya yang jadi penghambat ialah tidak adanya pengakuan yang didapatkan terhadap kontribusi kinerja internak kolaborasi itu sendiri maupun pertanggung jawaban yang telah dibuat bersama, dengan begitu akan menimbulkan pertanyaan apakah seluruh pihak dapat memenuhi tanggu jawabnya atau tidak dalam berkolaborasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang merupakan metode untuk memahami dan memahami secara mendalam suatu gejala (Raco, 2010). Ada dua jenis penelitian kualitatif: penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk memahami dan memaknai gejala yang tampak serta membangun teori baru. Metode ini digunakan untuk memberi gambaran faktual mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo. Pada penelitian ini memilih subjek penelitian secara *puposive* dengan mempertimbangkan masalah yang diangkat dan teori substantif penelitian ini, yaitu berlokasi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo dan Masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Penulis menetapkan lokasi di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dalam penelitian penanggulangan *stunting* ini karena, disini pemerintah berperan sebagai fasilitator pada proses kolaborasi dan organisasi Aisyiyah sebagai pihak yang mengajukan untuk melakukan kolaborasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, data primer yang didapatkan secara langsung dengan sumber aslinya atau tanpa perantara dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dari catatan orang lain yang berbentuk seperti catatan harian, surat arsip, hasil rapat, berita, jurnal dan sebagainya. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali data yang berasal dari triangulasi sumber dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber, selanjutnya melakukan triangulasi teknik dengan yakni dengan memeriksa kembali data yang diperoleh pada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda, kemudian yang terakhir yakni triangulasi waktu yang mana melakukan wawancara pada pagi hari, hal ini dilakukan karena dipagi hari dirasa lebih valid karena pemikiran masih segar dan belum terdapat beberapa masalah pada sumber.

Fokus Penelitian ini ialah penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* dengan menggunakan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008). Pada model ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu; kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang memiliki lima sub tahapan, yaitu; dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama dan hasil antara (pertengahan).

Informan pada penelitian ini ialah Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas, pengujian *transferability*, pengujian *dependability* dan pengujian *confirmability*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Collaborative governance yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo dilakukan agar kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo dapat terlaksana dengan baik. Terdapat penelitian terdahulu oleh Putri & Nurcahyanto, (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan di Desa Kalirandu telah berlangsung dengan baik, namun masih ditemukan kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan *stunting*. Hal ini mendukung peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian dengan fokus *collaborative governance* berdasarkan pada teori Ansell & Gash, (2008)

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo. Menurut Crosby dan Bryson dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020) bahwa peranan pemangku kepentingan dapat dilakukan analisis dengan menggunakan matriks peran pemangku kepentingan, kemudian dilakukan analisis pemangku kepentingan dengan menentukan peta keterkaitan anatara pengaruh (*power*) dan tingkat kepentingan (*interest*) setiap pemangku kepentingan. Terdapat 4 kategori pemangku kepentingan yakni 1) subjek (*subject*); 2) pemain kunci (*players*); 3) pengikut lain (*contest setter*); dan 4) pendukung (*crowd*) seperti gambar dibawah ini:

Matriks Power Versus Interest Grids



Sumber; Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, (2020)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diuraikan peranan masing-masing pemangku kepentingan yakni;

1. Subjek

Merupakan organisasi yang memiliki kepentingan besar namun memiliki pengaruh yang rendah. Subjek ini dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap suatu kegiatan yang memiliki kesungguhan lebih baik. Dalam penelitian ini, yang berperan adalah organisasi Aisyiyah, hal ini dikarenakan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap *stunting* di Kabupaten Probolinggo.

2. Pemain kunci

Merupakan pihak yang memiliki kepentingan besar dan pengaruh yang besar atau sebagai pemain yang utama. Lembaga ini memiliki pengaruh yang besar untuk melakukan sesuatu maupun membuat aturan dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai pemain kunci adalah pihak pihak Pemerintah Kabupaten

Probolinggo. Dimana Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memiliki aturan dan wewenang dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo.

3. Pendukung

Merupakan kelompok yang memiliki pengaruh besar akan tetapi memiliki kepentingan yang rendah. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai pendukung adalah kader-kader keluarga berencana pada setiap Kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

4. Pengikut lainnya

Merupakan pihak yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruh yang kecil. Pada umumnya kelompok ini adalah masyarakat atau lembaga yang kurang peduli atas suatu kegiatan.

Berikut adalah hasil uraian atau penjelasan kajian penganganan *stunting* yang telah dilakukan.

1. Kondisi awal

Tahapan kondisi awal adalah tahapan yang sangat mempengaruhi proses kolaborasi terjadi. Pada tahapan ini terdapat tiga poin penting yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu; latar belakang kerjasama sebelum terjadinya organisasi, keseimbangan sumber daya yang ada didalamnya dan insentif atau motivasi untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo merupakan yang pertamakali, belum pernah ada sebelumnya. Kolaborasi ini terjadi atas kesengajaan organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo dengan mengajukan proposal ke Pemerintah untuk menanggulangi *stunting* dan pengajuan proposal kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, karena pada awalnya organisasi Aisyiyah telah berjalan sendiri untuk melakukan program penanggulangan *stunting* pada Oktober 2022, namun hanya di 3 kecamatan saja. Proposal kerjasama ini diajukan dengan niat agar bisa memperluas jangkauan penanggulangan *stunting* yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Keseimbangan sumber daya manusia yang dimiliki, organisasi Aisyiyah memiliki anggota yang memiliki latar belakang pendidikan pertanian, ini dimanfaatkan untuk

melakukan pelatihan penanaman sayuran lokal baik dari media tanah maupun media hidroponik. Sayuran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai makanan tambahan bagi anak maupun ibu yang sedang mengandung. Seperti disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Entin sebagai berikut;

"Terkait dengan pengetahuan yang dimiliki anggota kami mengenai stunting, kami memiliki anggota dengan latar belakang pendidikan dibidang pertanian seperti mbak Vini ini contohnya, sehingga memiliki keahlian tentang cara-cara penanaman sayuran lokal dan penanaman melalui media hidroponik yang nantinya bisa untuk dijadikan sebagai makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak dengan gejala stunting. Namun dalam melakukan sosialisasi mengenai stunting kami mendapatkan narasumber yang berkompeten dibidang tersebut".

Pelatihan Menanam Melalui Media Hidroponik



Namun mereka masih belum ada yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan khususnya *stunting* yang dapat diatasi oleh pemerintah melalui diadakannya narasumber bidan dari posyandu atau puskesmas sebagai fasilitas kegiatan program kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersedia untuk mendukung keberlangsungan program dengan cara menghadirkan narasumber seperti dokter dan ahli gizi sehingga keduanya bisa saling memenuhi apa yang sedang dibutuhkan dalam melancarkan pelaksanaan program kolaborasi penanggulangan *stunting* ini.

Dorongan berupa insentif atau keuntungan dan motivasi dalam berpartisipasi dalam melakukan proses kolaborasi merupakan hal yang sangat diperhitungkan dalam melakukan kolaborasi, sudah seharusnya pihak-pihak yang melakukan kolaborasi mengetahui keuntungan apa yang didapatkan dari adanya kolaborasi ini. Pada kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo ini insentif yang didapatkan ialah berkurangnya kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Probolinggo, kolaborasi ini terjadi berdasarkan oleh rasa kemanusiaan atau secara sukarela (no-

materiil) untuk menanggulangi *stunting* yang ada di Kabupaten Probolinggo dan mengendepankan pada nilai sosial dengan niat membantu masyarakat yang *stunting*.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan aturan pelaksanaan yang jelas dan mendasari dari terjadinya proses kolaborasi. Adapun kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dengan organisasi Aisyiyah ini dilakukan dengan latar belakang keinginan organisasi Aisyiyah untuk memperluas jangkauan dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo, keinginan tersebut disambut baik dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kolaborasi ini merupakan kerjasama yang pertama kalinya dijalin oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menanggulangi *stunting* di kabupaten Probolinggo. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan organisasi Aisyiyah untuk bisa menjalin kerjasama dan berkomitmen dalam menanggulangi *stunting*.

Seiring berjalannya waktu, penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo telah memiliki aturan dasar yang bersifat formal dan memiliki legalitas secara tertulis berupa MoU dan telah disepakati serta dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada didalamnya untuk melaksanakan program kolaborasi. Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk pengawasan serta pembinaan dalam berjalannya proses kolaborasi dan organisasi Aisyiyah memiliki kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan berdasarkan program kolaborasi yang telah dilaksanakan, hal ini dilakukan karena pemerintah tidak terjun secara langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur yang penting untuk melakukan kolaborasi, pemimpin harus bisa menyatukan serta menggerakkan pemangku kepentingan yang ada didalamnya untuk melakukan kolaborasi. Peran kepemimpinan fasilitatif dalam kajian ini dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal ini karena dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi difasilitasi oleh Pemerintah dalam menjembatani organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo dengan sektor lain agar lebih mudah berkolaborasi serta memfasilitasi kekurangan yang ada pada pelaksanaan

prorgam kolaborasi seperti sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan khususnya *stunting* yang belum dimiliki oleh organisasi Aisyiyah.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan implementasi dari kegiatan program kolaborasi. Berdasarkan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, (2008) proses kolaborasi digambarkan secara bertahap, tahapan proses kolaborasi ini memiliki 5 sub tahapan yang meliputi; dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil antara (pertengahan) dengan penjelasan berikut ini.

a) Dialog tatap muka

Pelaksanaan *collaborative governace* dibangun berdasarkan dialog atap muka yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Dialog tatap muka ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama selain itu pada tahapan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan yang mungkin akan didapatkan pada saat berjalannya proses kolaborasi dan juga mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi selama pengimplementasian kegiatan program kolaborasi. Pada kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo, tahapan dialog tatap muka jarang dilakukan, padahal kegiatan dialog tatap muka ini sangat penting melihat tidak semua pemangku kepentingan terjun secara langsung kelapangan, sehingga komunikasi ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kondisi dilapangan secara jelas.

b) Membangun kepercayaan

Pemimpin harus dapat membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil resiko dan mampu meyakinkan bahwa hal tersebut akan berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan pemimpin dari kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo yang membangun kepercayaan para pemangku kepentingan dengan cara melakukan komunikasi secara intens. Komunikasi yang dilakukan secara intensif akan menciptakan kedekatan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menumbuhkan sikap saling percaya yang bisa meyakinkan bahwa kolaborasi ini akan berhasil mencapai tujuan.

c) Komitmen terhadap proses kolaborasi

Proses kolaborasi berlangsung pada waktu yang lama dibutuhkan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Komitmen ini berkaitan dengan motivasi, sehingga diperlukan keinginan yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk menanggulangi *stunting* di Kabupaten Probolinggo. Kolaborasi ini terbentuk atas keinginan organisasi Aisyiyah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menanggulangi *stunting* yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang tinggi pada kolaborasi ini. Terlihat bahwa organisasi Aisyiyah Kabupaten Probolinggo menunjukkan komitmennya dengan cara merancang dan menyusun program kolaborasi sedangkan Pemerintah menunjukkan bentuk komitmennya dengan cara memberikan fasilitas terbaik pada saat pelaksanaan program kegiatan kolaborasi.

d) Pemahaman bersama

Pemahaman bersama harus dibangun pada kolaborasi tentang apa tujuan dari kolaborasi ini, nilai yang akan dicapai dan masalah yang dihadapi secara jelas. Pada kolaborasi ini organisasi Aisyiyah lebih dominan dalam manajemen dan perencanaan kolaborasi yang bertemu langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kondisi dilapangan. Organisasi Aisyiyah membangun pemahaman bersama dengan cara melakukan diskusi bersama para pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bisa melakukan evaluasi bersama.

e) Hasil antara (pertengahan)

Hasil antara ini bisa dikatakan juga kemenangan kecil yang telah dicapai pada proses kolaborasi. Kemenangan kecil ini dapat memacu semangat para pemangku kepentingan untuk bisa mencapai tujuan. Hasil antara (pertengahan) yang didapatkan pada kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo ini cukup memuaskan. Terbukti bahwa kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo berdampak pada menurunnya angka *stunting* pada kolaborasi yang baru saja dijalin dalam kurun waktu lima bulan ini.

Data Balita *Stunting* Kabupaten Probolinggo Tahun 2022- Pertengahan 2023

| Tahun | Jumlah |
|-------|-------------|
| 2022 | 12.089 Jiwa |
| 2023 | 11.712 Jiwa |

Sumber; diolah dari <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/>

Dapat dilihat dari data diatas bahwa *stunting* di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebanyak 377 jiwa selama berjalannya kolaborasi periode tahun 2022 sampai pada pertengahan tahun 2023.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan empat variabel model kolaborasi dari Ansell & Gash, (2008) maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kondisi awal

Kolaborasi ini terjadi karena adanya pengajuan kolaborasi dari organisasi Aisyiyah, yang sebelumnya organisasi tersebut sudah melakukan upaya penanggulangan *stunting* sendiri namun hanya di 3 kecamatan saja, oleh sebab itu pengajuan kolaborasi tersebut dilakukan agar jangkauan penanggulangan *stunting* bisa lebih luas. Sumberdaya yang dimiliki masih belum mencukupi namun hal tersebut bisa diselesaikan oleh pemerintah sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan program kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan secara sukarela untuk menurunkan kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Probolinggo sehingga keuntungan yang didapatkan dalam kolaborasi ini ialah non materiil.

2. Desain kelembagaan

Kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo dalam prespektif *collaborative governance* ini telah memiliki aturan dasar berupa MoU yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dan sudah memiliki hak dan kewajiban dari seluruh pemangku kepentingan. Serta seluruhnya telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah tertulis di MoU.

3. Kepemimpinan fasilitatif

Pemerintah dalam kolaborasi ini memiliki peran yang dominan. Pemerintah memfasilitasi narasumber yang berkompeten dibidang kesehatan khususnya *stunting* untuk mendukung jalannya program kolaborasi. Pemerintah juga menjabatani perizinan yang dibutuhkan ke perangkat daerah atau dinas yang dibutuhkan untuk mendukung program kolaborasi.

4. Proses kolaborasi

Pada proses kolaborasi ini memiliki 5 tahapan, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, pemahama bersama dan hasil antara (pertengahan). Secara keseluruhan dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Probolinggo ini sudah menjalankan sesuai dengan model kolaborasi yang kemukakan oleh Ansell dan Gash. Namun pada dialog tatap muka masih sangat kurang intensitas pertemuan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Hasil antara yang didapatkan juga cukup memuaskan bahwa dalam kurun waktu 5 bulan hasil kolaborasi penganganan *stunting* di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya penurunan angka *stunting* sebanyak 377 jiwa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Pada pelaksanaan proses kolaborasi, dialog tatap muka harus sering dilakukan pemangku kepentingan, karena dari dialog tatap muka tersebut para pemangku kepentingan bisa saling bertukar pikiran dan melahirkan ide-ide baru serta dapat menghindari adanya konflik yang kemungkinan terjadi.
2. Kolaborasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, diharapkan proses kolaborasi ini bisa terus dipertahankan agar tujuan dapat dengan cepat diraih sehingga kasus *stunting* di Kabupaten Probolinggo dapat diturunkan.

Daftar Pustaka

- Annita Olo, Henny Suzana Mediani, W. R. (2021). Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian *Stunting* pada Balita di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1113–1327, <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/788>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of*

- Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571, <https://academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370>.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Prespektif Administrasi Publik. Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, [https://docpak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative%20gov%20%20\(revisi\)_5%207%2020-converted-.pdf](https://docpak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative%20gov%20%20(revisi)_5%207%2020-converted-.pdf).
- Hertati, D., & Arif, L. (2022). Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank. *KnE Social Sciences*, 2022, 1–13, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/10923/17696>.
- Islamy, L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LSmJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Collaborative+Governance+Konsep+dan+Aplikasi.+Collaborative+Governance+Konsep+dan+Aplikasi.&ots=TqO4D88Ekg&sig=sQAeISjGWChhsUER4ihssmNm4c&redir_esc=y#v=onepage&q=Collaborative%20Governance%20Konsep%20dan%20Aplikasi.%20Collaborative%20Governance%20Konsep%20dan%20Aplikasi.&f=false.
- Marwiyah, S., Devi, N. U. K., & Jailani, M. (2022). Implementasi Program Weljo Peduli *Stunting* Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas (Studi Pada Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 10374–10379, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3410>.
- Nugroho, M. R., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 2269–2276, <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/1169>.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan *Stunting* di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 68–85, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30594>.
- Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,

<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/222052/metode-penelitian-kualitaif-jenis-karakteristik-dan-keunggulannya>.

- Salunke, S., & Lal, D. K. (2017). Multisectoral Approach for Promoting Public Health. *Indian Journal of Public Health*, 61(3), 163–168, https://journals.lww.com/IJPH/Fulltext/2017/61030/Multisectoral_Approach_for_Promoting_Public_Health.3.aspx.
- Setiyowati, T. (2019). Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Toleransi Masyarakat beda Agama*, 30(28), 5053156.
- Sumardilah, D. S., & Rahmadi, A. (2019). Risiko *Stunting* Anak Baduta (7-24 bulan). *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 93, <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1245>.
- Tentama, F., Delfores, H. D. L., Wicaksono, A. E., & Fatonah, S. F. (2018). Penguatan Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka *Stunting* Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 113–120, <http://journal2.uad.ac.id/index.php/jpmuad/article/view/546/pdf>.